

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut *output* proses yang telah diuraikan, kajian yang bertajuk “Hubungan Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten” bisa diambil beberapa poin sebagai berikut:

1. Tidak adanya ditemukan dampak sebagaimana signifikan dari pengeluaran pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Menurut *output* analisis FEVD terungkap bahwa kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap variasi perubahan jumlah hanya sebesar 0,79%, Temuan ini menunjukkan bahwa selama periode analisis, pengeluaran pemerintah belum mampu berperan secara efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara substansial, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas arah dan implementasi kebijakan belanja publik yang telah dilakukan.
2. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan pengeluaran pemerintah, yaitu sebesar sekitar 38% berdasarkan hasil analisis FEVD. Temuan ini menggambarkan bahwasanya pengeluaran pemerintah lebih bersifat responsif terhadap kondisi kemiskinan, di mana pemerintah cenderung menyesuaikan kebijakan fiskalnya seperti belanja bantuan sosial atau program penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya angka kemiskinan.
3. Dengan demikian, hubungan yang terbangun dalam model cenderung bersifat reaktif, di mana pengeluaran pemerintah merespons perubahan jumlah penduduk miskin, bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa

kebijakan fiskal di Provinsi Banten lebih menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial ekonomi yang terjadi, ketimbang secara aktif digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan hasil uji *Granger Causality* dan *Impulse Response Function* (IRF), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh jangka pendek terhadap kemiskinan, namun tidak cukup kuat untuk membentuk hubungan kausal jangka panjang yang stabil.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil yang sudah disampaikan, peneliti mengemukakan sejumlah masukan, yaitu:

1. Efektivitas pengeluaran pemerintahan perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan mengalokasikan anggaran untuk program beasiswa siswa miskin dan BOS daerah, sektor kesehatan mengatur subsidi premi BPJS bagi keluarga miskin, dan belanja bantuan sosial yaitu penerima bansos diperbaharui secara berkala, ada *monitoring* penggunaan bansos sehingga bantuan tidak hanya konsumtif tapi juga produktif.. Upaya peningkatan tidak hanya terbatas pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran, kesinambungan program, serta kualitas implementasi kebijakan, agar dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi lebih nyata, terukur, dan berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah di Provinsi Banten perlu merancang kebijakan pengeluaran yang lebih strategis, berbasis bukti (*evidence-based*)

berdasarkan penelitian (Jurnal UII, 2023), Harapan Lama Sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Banten. Setiap kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar 32,51 ribu jiwa dan responsif terhadap kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memprioritaskan program yang mendorong peningkatan akses dan mutu pendidikan, seperti pemberian beasiswa untuk keluarga miskin, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelatihan guru yang berkualitas.

3. Untuk penelitian berikutnya, direkomendasikan agar memakai data dengan cakupan elemen yang lebih luas, sebagaimana memasukkan indikator pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja sehingga hubungan antar variabel dapat dianalisis secara lebih komprehensif.